

## **PARADIGMA PLURALISME AGAMA DALAM MENJAGA NILAI-NILAI KEINDONESIAAN**

**DOI:** <https://doi.org/10.22236/semnas.v1i1.82>

**Dulkarim<sup>1\*</sup>, Desvian Bandarsyah<sup>2</sup>**

*Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA*

*\*dulkarim97@gmail.com*

**Abstract:** This study aims to discuss more deeply and analyze the concept of the pluralism paradigm in maintaining Indonesian values, because there are several issues related to this. Understanding of religious pluralism becomes very important to be studied and deepened to be able to answer the reality of religious life in Indonesia, along with the rise of religious identity politics as one of the riots' capital. The research methodology used in this study is a historical research method which consists of four steps, namely: (1) heuristics is an activity to find sources to get historical data; (2) criticism is an activity of selecting data obtained; (3) interpretation is an activity outlining the historical facts obtained; (4) historiography is an activity of writing history based on historical facts obtained. Religious pluralism is an understanding of the recognition of the existence (even truth, for certain circles) of other religions in the Islamic view that encourages humans to be mature and positive in dealing with that condition, accepting diversity, tolerance which gives freedom and opportunity for everyone to live life according to their own beliefs, because what is needed in a plural society is so that every human race in goodness in a healthy and right way. Religious pluralism was born from the phenomenon of inter-religious conflict which then necessitated the birth of tolerance between followers of one religion and another. Religious pluralism in Islam is based on evidence that Islam is an inclusive, open religion that has unique attitudes that are different from other religious attitudes, namely tolerance, freedom, openness, justice and honesty. And there are Indonesian values which include: Christianity, Humanity, Justice, Equality, Liberation, Brotherhood, and Simplicity, Attitude of Knights, and Wisdom of Tradition.

**Keywords:** (Paradigm, Pluralism, Religion, Indonesia)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam dan menganalisis konsep paradigma pluralisme dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan, dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemahaman tentang pluralisme agama, menjadi begitu penting dikaji dan diperdalam untuk dapat menjawab realitas kehidupan beragama di Indonesia, seiring maraknya politik identitas agama sebagai salah satu modal kerusuhan. Metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data sejarah; (2) kritik merupakan kegiatan menyeleksi data-data yang didapatkan; (3) interpretasi merupakan kegiatan menguraikan fakta-fakta sejarah yang didapatkan; (4) historiografi merupakan kegiatan penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta sejarah yang didapatkan.. Pluralisme agama adalah sebuah paham tentang

pengakuan keberadaan (bahkan kebenaran, untuk kalangan tertentu) agama-agama lain dalam pandangan Islam yang menganjurkan manusia untuk bersikap dewasa dan positif dalam menghadapi keadaan tersebut, menerima keanekaragaman, toleransi yang memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupan menurut keyakinan masing, karena yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah agar setiap manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan jalan yang sehat dan benar. Pluralisme agama lahir dari fenomena konflik antar agama yang kemudian mengharuskan lahirnya sikap toleransi antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain. Pluralisme agama dalam Islam didasarkan pada bukti bahwa Islam merupakan agama inklusif yang bersifat terbuka yang mempunyai sikap-sikap unik yang berbeda dari sikap-sikap keagamaan yang lain, yaitu toleransi, kebebasan, keterbukaan, keadilan dan kejujuran. Serta terdapat nilai-nilai keindonesiaan yang di antaranya: Ketauhidan, Kemanusiaan, Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Persaudaraan, serta Kesederhanaan, Sikap Ksatria, dan Kearifan Tradisi.

**Kata kunci:** (*Paradigma, Pluralisme, Agama, Indonesia*)

## **PENDAHULUAN**

Pluralisme ialah paham kemajemukan atau paham yang berorientasi kepada keragaman dan memiliki berbagai penerapan berbeda baik dalam hal filsafat agama, moral, hukum dan politik yang batas kolektifnya ialah pengakuan atas kemajemukan di depan ketunggalan (Fahrurrozi, 2015). Pluralisme bukan suatu ajaran baru melainkan janji tentang kehidupan damai dan rukun antar masyarakat yang berbeda terutama agama. Pluralisme agama mendeskripsikan tentang kehidupan yang damai dan harmoni, dalam berbagai lingkungan agama yang ada di suatu komunitas masyarakat tertentu.

Agama dalam masyarakat yang berketuhanan merupakan proses ekspresi ibadah untuk mendapatkan hidayah dari Sang Penciptanya dengan harapan diberi kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam kenyataannya kehidupan beragama diwujudkan oleh adanya agama yang berbeda-beda menuju ketuhanannya, misalnya agama yang dianut oleh masyarakat islam di Indonesia.

Hal lain juga menafsirkan pluralisme agama bahwa hakikat dan keselamatan bukanlah monopoli satu agama tertentu, semua agama menyimpan hakikat kebenaran masing-masing serta menjalankan program agama dalam menuju ketuhanannya. Dengan hal ini dalam menghadapi dunia yang semakin plural, yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralisme, melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralisme itu (Ghazali, 2009).

Sahfutra (1988), mengatakan, sebagai Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara multikultur terbesar di dunia, yang dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Hal ini

Indonesia mempunyai potensi untuk membangun negara multikultur yang besar (*Multikultural Nationstate*). Akan tetapi keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Nasikun, 2008), bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama secara horizontal, yang ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam, contoh. Pertama masyarakat minoritas Islam dan mayoritas Hindu di Bali, sebagai wujud masyarakat multikultural yang sangat menghargai agama dan budaya ditengah perbedaan yang ada. Kedua seseorang yang memiliki tingkat ekonomi yang baik mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang yang paling tinggi dari pada orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Sahfutra (1988), menyebutkan negara yang memiliki keunikan multientis dan multimental seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri, di satu sisi membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai *multicultural nation-state*, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Maka bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu.

Keberlanjutan dalam perdebatan keberagaman atau pluralitas agama tentunya masih memberikan perhatian yang cukup besar dan dominan sepanjang zaman. Isu ini merupakan fenomena yang hadir di tengah keanekaragaman klaim kebenaran absolute antar agama yang saling bersebrangan. Yang setiap agama mengklaim dirinya yang paling benar dan yang lain merupakan agama sesat (Thoha, 2005).

Perdebatan tersebut tidak hanya sebatas masalah ketuhanan, melainkan juga merambah ke wilayah kehidupan yang sangat luas, termasuk dalam aspek ritual keagamaan, sosial, kesehatan, ekonomi dan politik. Sebagaimana yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat misalnya berkembang perdebatan tentang boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani, menjalin pertemanan dan kerjasama dalam bisnis, dan yang terakhir perdebatan boleh tidaknya orang non-muslim menjadi pemimpin pemerintahan atau kepala negara.

Agama telah menjadi entitas penting dalam proses perubahan nilai-nilai ke dalam wilayah publik negara Indonesia (Sirad, 2008). Sesungguhnya hubungan antara agama dan sejarah adalah hubungan yang erat, dalam kaca mata sejarah telah mencatat misalnya Majapahit yang menganut Hindu-Budha misalnya begitu terbuka dan mau menerima kehadiran para penyebar Islam. Dan secara historis, kenyataan ini sangat sulit di elak. Semenjak kehadiran agama Hindu-Budha, bangsa Indonesia sesungguhnya sudah berada pada wilayah kehidupan relegius serta plural.

Analisis historis di atas menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia telah menyadari kemajemukan, multietnik dan multi-agamanya sejak dulu. Kesadaran akan kebhinekaan ini kemudian dibangkitkan kembali pada masa perjuangan kemerdekaan untuk menggali semangat persatuan bangsa Indonesia yang ketika itu sedang menanggung penjajahan kolonial.

Beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengalami peristiwa yang sangat krusial dalam warna keagamaan, misalnya kerusuhan Sambas yang berlangsung tujuh kali sejak 1970 hingga yang terbesar tahun 1999. Akibat dari kerusuhan tersebut hampir 1.189 orang tewas. Januari 1999 konflik Ambon yang melibatkan etnis dan agama tercatat korban 12 orang tewas. Pada 18 Februari 2001 konflik suku Dayak dan Madura. Selanjutnya Mei 2018 merupakan aksi bunuh diri yang terjadi di tiga gereja Surabaya dengan korban hampir 17 orang tewas (BM, 2014). Terakhir kasus Pilkada DKI 2017 yang berlangsung dua putaran, dimana aktor politik cukup menggiring masyarakat ke arah politik identitas yang bertolak belakang dengan ruh demokrasi. Memang pada dasar dalam peristiwa tersebut tidak menimbulkan banyak korban namun disisi lain ketegangan dalam masyarakat tentu sulit dikendalikan.

Pentingnya untuk memahami pandangan pluralisme sebagai langkah akomodatif terhadap pemiliharaan dengan pengembangan khasanah potensi bangsa secara internal dan kontributif, bagi sebuah pandangan hubungan kemanusiaan antar pemeluk agama baik dalam konteks nasional ataupun mondial. Untuk itu, perlunya sosialisasi paham pluralism sebagai suatu proses edukasi dari proyek kebijakan harus sebisanya diterjemahkan ke dalam strategi pelebagaan kesadaran pluralism, dijadikan mentalitas setiap umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Santoso, 2014)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, fokus penelitian ini mencoba mendalami konsep paradigma pluralisme dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan,

dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemahaman tentang pluralisme agama, menjadi begitu penting dikaji dan diperdalam untuk dapat menjawab realitas kehidupan beragama di Indonesia, seiring maraknya politik identitas agama sebagai salah satu modal kerusuhan.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut kamus *The New Lexicon* (1989: 628) memberikan gambaran tentang pengertian metodologi yaitu suatu cabang filsafat yang berhubungan dengan ilmu tentang metode atau prosedur, suatu sistem tentang metode-metode dan aturan-aturan sains (Sjamsuddin, 2007). Sedangkan menurut Kamus *Webster's Third New International Dictionary of the English Language* yaitu:

1. Suatu prosedur atau proses untuk mendapatkan suatu objek.
2. Suatu disiplin atau sistem yang acapkali dianggap sebagai suatu cabang logika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk penyidikan ke dalam atau eksposisi dari beberapa subjek.
3. Suatu prosedur, taktik, atau cara melakukan penyelidikan yang sistematis yang dipakai oleh atau yang sesuai untuk suatu ilmu (sains), seni, atau disiplin tertentu.
4. Suatu rencana sistematis yang diikuti dalam menyajikan materi untuk pengajaran.
5. Suatu cara memandang, mengorganisasi, memberikan bentuk dan arti khusus pada materi-materi artistic: 1) suatu cara, teknik, atau proses dari atau untuk melakukan sesuatu; 2) suatu keseluruhan keterampilan-keterampilan (*a body of skills*) atau teknik-teknik (Gunawan, 2013)

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian mengenai paradigma pluralisme dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan, merupakan penelitian sejarah. Karena penelitian ini diarahkan untuk meneliti, mengungkapkan dan menjelaskan peristiwa masa lampau sehingga jelas diarahkan pada metode sejarah.

Penelitian historis yaitu menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menafsirkan paradigma pluralisme dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan serta sumbangsih terhadap Indonesia. Penelitian historis ini melalui beberapa tahapan yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi, dengan penjelasan sebagaimana berikut di bawah ini.

#### **a. Heuristik**

Menurut Carrard (1992) dan Gee (1950) heuristik (heuristics) merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi serajah/deviden sejarah (Sjamsuddin, 2007). Sehingga apa yang disampaikan bahwa Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian dimana kegiatan ini melalui tahap pengumpulan sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, dan bukti-bukti kesejarahan yang akan diteliti. Penelitian ini peneliti akan menggunakan sumber sekunder yang diantaranya buku, majalah, jurnal, makalah, dan skripsi yang berkaitan dengan sejarah.

Proses pengumpulan sumber yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu telah mencari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan paradigma pluralisme dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan.

#### **b. Kritik Sumber**

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah untuk menentukan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah (Muhammad Shaleh, 2015: 47). Kritik sumber merupakan tahap kedua dalam melakukan penelitian historis kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber tersebut, tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta dalam hal ini juga kritik sumber memberikan pengklasifikasian yang berdasarkan kerangka tulisan. Metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal (Sjamsuddin, 2007).

#### **c. Interpretasi**

Pada tahap penafsiran dilakukan karena ingin mencipta ulang dengan deskripsi dan narasi serta melakukan penafsiran (interpret) dengan menggunakan analisa dan

berorientasi kepada problem. Teknik analisis deskripsi narasi seringkali dikaitkan dengan bentuk model sejarah lama, sedangkan teknik analisis dikaitkan dengan bentuk atau model sejarah baru yang ilmiah (Sjamsuddin, 2007), model interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah juga dapat diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta sejarah, dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal.

#### **d. Historiografi**

Historiografi terbentuk dari dua akar kata yaitu *history* dan *grafi*. *History* artinya sejarah dan *grafi* artinya tulisan. Jadi historiografi artinya tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat tidak ilmiah. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam penyusunan sejarah. Penulisan sejarah mencoba untuk memperluas dimensi-dimensi yang disoroti sehingga istilah sejarah memiliki makna multidimensional.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu suatu penulisan sejarah yang berujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa masa lalu, yang kemudian dicari sebab-akibatnya dan disajikan dalam bentuk cerita.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **PLURALISME DALAM PERSPEKTIF SEJARAH**

Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan (*Enlightenment*) Eropa, tepat pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Yaitu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama. Yang ditengah hiruk-pikuk pergolakan pemikiran di Eropa yang timbul sebagai konsekuensi logis dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja, muncullah suatu paham yang dikenal dengan “liberalism” yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keberagaman atau pluralisme (Thoha, 2005).

Oleh karena paham “liberalism” pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial politis, maka wacana pluralisme yang lahir dari rahimnya, maka secara tidak langsung gagasan pluralisme agama juga kental dengan nuansa aroma politik. maka tidak aneh

jika kemudian gagasan pluralisme agama itu sendiri muncul dan hadir dalam kemasan (*political pluralism*) politik pluralisme, yang merupakan produk dari liberalism politik.

Legenhausen (1392), Seorang pemikir Muslim kontemporer, juga berpendapat bahwa munculnya faham “liberalism politik” di Eropa abad ke-18 sebagian besar didorong oleh kondisi masyarakat yang carut-marut akibat memuncaknya sikap-sikap intoleran dan konflik-konflik etnis, sektarian yang pada akhirnya menyeret pada pertumpahan darah antar ras, budaya dan mazhab pada reformasi keagamaan. Meskipun hembungan angin pluralisme telah mewarnai pemikiran Eropa pada saat itu, tetapi masih belum secara kuat mengakar dalam kultur masyarakatnya. Beberapa sekte Kristen ternyata masih mengalami perlakuan diskriminatif dari gereja, sebagaimana yang dialami sekte Mormon yang tetap tidak diakui oleh gereja karena dianggap gerakan heterodox, sampai akhir abad ke Sembilan belas ketika muncul protes keras dari Presiden Amerika Serikat Grover Cleveland (1837-1908).

Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah gagasan pluralisme agama sebenarnya bukan hanya hasil dominasi pemikir Barat, akan tetapi mempunyai akar yang cukup kuat dalam pemikiran agama Timur, khususnya dari India, sebagaimana yang muncul pada gerakan-gerakan pembaharuan sosio-religious diwilayah ini. Beberapa peneliti dan sarjana Barat, seperti Parrinder dan Sharpe, justru menganggap bahwa pencetus gagasan pluralisme agama adalah tokoh-tokoh dan pemikir- pemikir yang berbangsa India. Rammohan Ray (1772-1833) pencetus gerakan Brahma Samaj yang semula pemeluk agama Hindu, telah mempelajari konsep keimanan terhadap Tuhan dari sumber-sumber Islam, sehingga ia mencetuskan pemikiran Tuhan Satu dan persamaan antar agama. Sri Ramakrishna (1834-1886), seorang mistis Bengali, setelah mengarungi pengembaraan spiritual antar agama (*passing over*) dari agama Hindu ke Islam, kemudian ke Kristen dan akhirnya kembali ke Hindu lagi, juga menceritakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam agama-agama sebenarnya tidaklah berarti, karena perbedaan tersebut sebenarnya hanya masalah ekspresi (Thoha, 2005).

Dalam konteks keindonesiaan, negara Indonesia dikenal oleh dunia sebagai satu negara kepulauan yang memiliki pluralitas, kemajemukan, dan heterogenitas suku bangsa yang mendiami kepulauannya. Badan Pusat Statistik (2013), menyebutkan penelitian etnologi diketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan perbedaan identitasnya masing-masing dan kebudayaan yang berbeda. Dari catatan sensus tahun 2017, menunjukkan bahwa indonesia memiliki 101 suku bangsa dengan jumlah penduduk 264.092.238

jiwa sebagai warga negara. Dalam menjaga kerukunan atas kemajemukan disuatu negara tentu upaya yang harus di lakukan adalah pemahaman kita terhadap ideologi Indonesia.

Bangsa Indonesia yang merupakan penganut ideologi Pancasila telah menjamin keberadaan semua komponen masyarakat dengan segala latar belakang pemahaman yang patut dijaga dan diyakini sebagai jalan hidup (*way of life*) menuju kedamaian (*as-salam*). Bahkan, Pancasila merupakan dasar persatuan dan haluan kemajuan bangsa yang mampu membimbing setiap orang menjadi pribadi yang bersahaja (Ghufron, 2016). Senada dengan konsep masyarakat majemuk atau masyarakat plural sering kali dibicarakan bersama-sama dengan konsep masyarakat multikultural, karena keduanya sama-sama menggambarkan keanekaragaman sosial dan kebudayaan.

Sementara itu dalam diskursus pemikiran pluralisme agama di Indonesia Nurcholish Madjid mempunyai pandangan bahwa kemajemukan atau pluralitas umat manusia adalah suatu kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Jika dalam kitab suci disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenai dan menghargai (QS al-Hujurat/49:13), maka pluralitas itu meningkat menjadi pluralisme, yaitu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat baik sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut (Madjid, 1995). Karena hukum Tuhan tersebut, ditambah dengan berbagai faktor pembatas yang tidak mungkin dihilangkan tentang negeri kita ini yang sebagai negeri kepulauan terbesar di muka bumi, maka dari segi kemajemukan sosial budaya lebih-lebih akan tetap merupakan gejala menonjol yang amat penting untuk selalu diperhitungkan.

Sehingga menurut Cak Nur pluralisme adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak dapat dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak-hak agama lainnya, kecuali yang berdasarkan paganisme atau syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain itu dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial, budaya, dan agamayang sebagai ketetapan Tuhan yang tidak berubah-ubah (QS al-Ma'idah/5:4-50).

Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur mempunyai pandangan bahwa memposisikan demokrasi dan pluralisme sebagai pilar penyangga yang memberikan hak yang sama bagi setiap agama. Oleh karena itu, ia menolak agama dijadikan sebagai dasar negara. Hal ini apabila sebuah agama menjadi dasar negara maka akan ada warga negara kelas dua karena hal ini akan berakibat pada hak politik yang pasti akan berbeda. Gus Dur mencontohkan misalnya, pandangan yang sama tentang tiadanya hak bagi warga negara non muslim untuk menjadi kepala negara di negeri kita saat ini. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap demokrasi. Pandangan

seperti ini berarti melebihkan kedudukan sebuah agama, dalam hal ini Islam, yang menjadi agama mayoritas penduduk, atas agama-agama lain dengan demikian melanggar prinsip demokrasi yang terkandung baik dalam pembukaan maupun pasal 29 ayat 2 UUD 1945 (Wahid, 2007).

Gus Dur sering menganalogikan konsep pluralisme yang ia miliki ibarat sebuah rumah besar yang terdiri atas banyak kamar dan setiap orang memiliki kamarnya sendiri-sendiri. Saat di dalam kamar, setiap orang dapat merawat dan menggunakan kamarnya serta berhak melakukan apapun di dalam kamarnya. Namun ketika berada di ruang tamu atau ruang keluarga, maka setiap penghuni kamar wajib melebur untuk menjaga kepentingan rumah bersama. Semua penghuni kamar wajib bekerjasama merawat, menjaga, dan melindungi keseluruhan bagian rumah tersebut. Ketika terjadi serangan dari luar, maka mereka tanpa mempermasalahkan asal kamar harus bersatu melawan para penyerang yang ingin merusak keberadaan rumah tersebut. Bila dihubungkan dalam konteks negara, maka seluruh warga negara yang menjadi penghuni rumah NKRI wajib merawat, menjaga, dan melindungi rumah besar NKRI yang telah dibangun di atas fondasi Pancasila dan keragaman identitas primordial (Wahid, 2006). Uraian diatas pada dasarnya ingin menyampaikan bahwa perlunya kerendahan hati dalam menyikapi setiap masalah dan kerendahan hati tentu diharapkannya untuk terus-menerus dilakukan. Jika hal itu terjadinya secara tidak langsung di tengah masyarakat nantinya akan menemukan pola kehidupan yang terbingkai dalam satu rumah yang penuh keragaman atau pluralisme.

Implementasi paham nilai-nilai keindonesiaan dalam kehidupan yang berkonteks pluralisme agama yang serba mutli iman harus disandarkan pada kesadaran pentingnya menjalin kerjasama antar satu pemeluk, kelompok agama dengan pemeluk agama lain. Kesadaran ini tidak hanya sebatas penerimaan keberadaan agama orang lain sebagai sebuah realita semata. Jika setiap agama dan keyakinan berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan roda kehidupan, menyelesaikan masalah sosial-politik dengan konsepnya sendiri tentu akan terjadi benturan konsep, kepentingan bahkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan gesekan antar dan inter umat beragama, bagi mereka yang merasa bahwa konsepnya yang paling benar dan pantas untuk dipakai.

Dalam konteks kekinian, pluralisme agama telah menjadi wacana yang tidak hanya di kalangan agamawan, tetapi juga di kalangan intelektual dan budayawan. Hal ini disebabkan kompleksitas masalah yang muncul tidak mungkin dipecahkan oleh

penganut agama tertentu tetapi harus secara bersama-sama dari setiap agama. Maka pluralisme agama menjadi suatu kemestian yang harus diterima (A'la, 2002). Oleh karena itu, sudah semestinya kita memperluas dan memperdalam untuk ikut aktif dalam seruan pluralisme, sehingga agar kita tidak terjebak dalam pemikiran bahwa untuk menjaga keberagaman hanyalah tugas agamawan ataupun pemerintah semata. Diungkapkan pluralisme (paham kemajemukan) agama, Al-Quran tampaknya berangkat lebih jauh. Tidak saja orang yang mengakui keragaman agama yang dipeluk oleh umat manusia, mereka yang tidak beragama pun harus punya tempat untuk melangsungkan hidupnya di bumi (Maarif, 2009). Kepastian kesadaran pluralisme agama dan terwujudnya sikap toleransi yang aktif memungkinkan dibukanya dialog yang lebih baik antarumat beragama, khususnya musyawarah hal-hal yang bersifat kebersamaan, pencarian solusi atas masalah bersama dan membangun konsep bersama untuk kemaslahatan umat manusia tanpa melihat apa agama dan keyakinannya. Hal serupa juga harus dilakukan dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan yaitu dengan cara penguatan dalam pembelajaran sejarah di lingkup pendidikan memiliki makna yang sangat penting bagi wujud dan keberlanjutan suatu bangsa. Sekait dengan hal tersebut Rochiati, (2002:55) menjelaskan bahwa sejarah sebagai bagian dari pengajaran anak manusia usianya sudah cukup tua, jauh lebih tua dari saat untuk pertama kali sejarah dituliskan. Sampai saat ini sejarah dimaknai sebagai peristiwa yang pernah berlangsung, kisah yang pernah terjadi dan ilmu yang mempelajari peristiwa itu sehingga menghasilkan kisah sejarah yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar bagi umat manusia dalam meniti kehidupan (Suswandari, 2010).

## **KESIMPULAN**

Dari uraian penjelasan dan pembahasan mengenai paradigma pluralisme agama dalam menjaga nilai-nilai keindonesiaan adalah sebuah paham tentang pengakuan keberadaan (bahkan kebenaran, untuk kalangan tertentu) agama-agama lain dalam pandangan Islam yang menganjurkan manusia untuk bersikap dewasa dan positif dalam menghadapi keadaan tersebut, menerima keanekaragaman, toleransi yang memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang menjalani kehidupan menurut keyakinan masing, karena yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk adalah agar setiap manusia berlomba-lomba dalam kebaikan dengan jalan yang sehat dan benar. Pluralisme agama lahir dari fenomena konflik antar agama yang kemudian

mengharuskan lahirnya sikap toleransi antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A'la, A. (2002). *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: PT Kompas.
- Barbour, I. G. (2013). *Agama dan Sains*. Amerika: Harper Collins.
- Barton, G. (1997). *Biografi Gus Dur*. Jakarta: Mahabbah.
- BM, S. A. (2014). Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal dakwah Tabligh*, 15(2), 189–208.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Bruno, L. (2019). 濟無No Title No Title. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fahrurrozi, F. (2015). Ekspresi Keberagaman Masyarakat Islam Indonesia: Mozaik Multikulturalisme Indonesia. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(1), 15–34. Retrieved from <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/1419>
- Franz, & SJ, M.-S. (1995). *Mencari Sosok Demokrasi: Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Ghazali. (2009). *No Title*. Depok: Katakita.
- Ghufron. (2016). *Ekspresi Keberagaman di Era Milenium*. Yogyakarta: IRCisoD.
- Gunawan, R. (2013). *Sejarah Asia Tenggara*. Bandung: Alfabeta.
- Haejong, J. (2009). Dissertation Abstract: A Critical Evaluation of John Hick's Religious Pluralism in Light of His Eschatological Model. *Andrews University Seminary Studies (AUSS)*, 47(2), 6.
- Legenhausen, M. (1392). Islam and Religious Pluralism. *های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده*. ز, 14, 1–44 نرژی
- Maarif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Refleksi Sejarah*. Jakarta: PT Mizan.
- Madjid, N. (1995a). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N. (1995b). *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 61–78.

<https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1542>

- Nasikun. (2008). *No Title*. jakarta: rajawali.
- Sahfutra, S. A. (1988). *Gagasan pluralisme agama gus dur untuk kesetaraan dan kerukunan*. 89–113.
- Santoso, D. (2014). *Menggagas Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Tebet 66.
- Sirad, A. (2008). *berkah islam Indonesia*. jakarta: Pustaka Cendekiamuda.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Ombak.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suswandari, S. (2010). Paradigma Pendidikan Sejarah Dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(1), 331–342.  
<https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.216>
- Talib, A. A. (n.d.). *Bangsa, Membangun Keharmonisan*. (14), 61–78.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama* (Indra, ed.). jakarta: Gema Insani.
- Wahid, A. (2006). *Islam Anda Islam Saya Islam Kita*. Jakarta: Gramedia.
- Wahid, A. (2007). *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia.